

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - ʘʘʘʘ

- Atmasasmita. Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Cet.1. Bandung: Binacipta.1983.
- Hamzah. Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet.2. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.1996
- Harahap. M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi. Dan Peninjauan Kembali*.ed.2. Cet.3.Jakarta: Sinar Grafika.2002
- Harahap. M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*.ed.2. Cet.4.Jakarta: Sinar Grafika.2002.
- Husein. Yunus. “PPATK: Tugas, Wewenang Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang” Makalah ini disampaikan pada diskusi terbatas mengenai “Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara” pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 di Jakarta Media Center (JMC). Gedung Dewan Pers. Jakarta.
- Husein. Yunus. “Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FFATF on Money Laundering.” Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Ekonomi. Jakarta. 23 Agustus 2001.
- Loqman. Loebby. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutihan Uang” Jakarta 1 Juli 2003
- Loqman. Loebby. *Pra Peradilan di Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Gahlia.1990.
- Pardede. Merulak. *Masalah Money Laundering Di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Kehakiman RI. 1994.
- Prakoso. Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Ed.1.Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Prinst. Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Cet.3.Jakarta: Djambatan.2002.

- Prodjodikoro. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 6. Bandung: PT. Eresco. 1989.
- Redana. I Ketut. “Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang” Makalah disampaikan pada sosialisasi rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Jakarta. 2 Juli 2003.
- Siahaan. N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.
- Sjahdeini. Sutan Remy. “*Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*” Makalah ini disajikan pada diskusi terbatas “*Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara*” pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 di Jakarta Media Center (JMC). Gedung Dewan Pers. Jakarta.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet 4. Jakarta: Rajawali Press. 1995.
- Soewarsono. “*Perkiraan Hambatan Yang Akan Muncul Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*” Makalah ini disajikan pada diskusi terbatas “*Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara*” pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 di Jakarta Media Center (JMC). Gedung Dewan Pers. Jakarta.
- Soewarsono. H dan Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: CV. Malibu. 2004.
- Sujata. Antonius. “*Positive Law On Money Laundering In Money Laundering*” Makalah disampaikan pada Internasional Seminar Money Laundering. Challenges and Its Impact on National Economy. Jakarta. 13-14 September 2002.
- Waluyo. Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 1992
- Suyitno. “*Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Tepat*” Makalah ini disajikan pada diskusi terbatas “*Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara*” pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 di Jakarta Media Center (JMC). Gedung Dewan Pers. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia A. Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No.15 Tahun 2002. LN No.30 Tahun 2002. TLN No.4191. Sebagaimana telah diubah dengan UU No.25. LN No.108 Tahun 2003. TLN. No.4324

Indonesia B. Undang-undang Hukum Acara Pidana. UU No.8 Tahun 1981. LN. No.14 Tahun 1981. TLN. No.123

Indonesia C. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No.20. LN No.134 Tahun 2001. TLN. No.4150.

C. JURNAL HUKUM, INTERNET, DLL

http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=25 Diakses 14 Juli 2004

“Policy Paper Komisi Hukum Nasional” <http://www.komisihukum.go.id> Diakses 11 Juli 2004

“Reformasi Hukum Belum Gagal. Namun Masih Berjalan Sangat Lambat.”http://www.komisihukum.go.id/news_event.php?mode=detil&jenis=news&if=72>_Diakses 14 Juli 2004.

